

Literasi Digital
Bagi Aparatur Sipil Negara
Dalam Mendukung Kota Makassar Sebagai Kota *Metaverse*
(Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Makassar)

A. Fifah Ilyana Ilham

NPP. 30.1161

Asdaf Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Teknologi rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: andifahilyana@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Irfan Uluputty, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Building a digitalization for ASN in realizing the Metaverse City concept based on Virtual Reality and Artificial Intelligence which aims to advance Makassar as a world city by providing insight into the use of technology for ASN as a foundation for role models for the people of Makassar City. **Purpose:** to analyze and describe how ASN competence in building a digital literacy culture is described in aspects of the DQ Institute Competency Components namely: *Skill, Knowledge and Attitude*. **Method:** A qualitative research method with a descriptive approach that explores ASN literacy culture information within the Makassar City Diskominfo scope. Descriptive reinforcement using data triangulation. **Result:** The description of the digitalization shows the fact that ASN competence is able to manage information according to needs, employees have a high ability to adapt to digitalization culture, ASN understand how netiquette interacts in digital space-based work patterns in the digitalization reform era and has become a milestone in the success of the Metaverse City concept in Makassar. **Conclusion:** The outline of this research is based on the Unesco concept of digital literacy competency, the ASN Diskominfo Makassar City is capable of adapting to digitalization in public services and participating in digital-based service innovations.

Keywords: *ASN, Metaverse City, Digital Literacy*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Digitalisasi bagi ASN dalam mewujudkan konsep Kota Metaverse berbasis Virtual Reality dan Artificial Intelligence yang bertujuan untuk memajukan Makassar sebagai kota dunia dengan memberikan pembekalan wawasan pemanfaatan teknologi bagi ASN sebagai pondasi role model bagi masyarakat di Kota Makassar. **Tujuan:** menganalisis dan menggambarkan bagaimana kompetensi ASN dalam membangun kompetensi literasi digital yang digambarkan dalam aspek Komponen Kompetensi DQ Institute yaitu: Skill, Knowledge and attitude. **Metode:** Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggali informasi literasi ASN di lingkup Diskominfo Kota Makassar. Penguatan deskriptif menggunakan triangulasi data. **Hasil/Temuan:** Gambaran digitalisasi menunjukkan fakta kompetensi ASN mampu mengelola informasi sesuai kebutuhan, pegawai memiliki kemampuan adaptasi digitalisasi yang tinggi, ASN

memahami cara netiket berinteraksi dalam pola kerja berbasis ruang digital di era reformasi digitalisasi serta menjadi tonggak pelopor keberhasilan konsep Kota Metaverse di Makassar. **Kesimpulan:** Garis besar penelitian ini berdasarkan konsep Unesco mengenai kompetensi literasi digital, ASN Diskominfo Kota Makassar secara mumpuni beradaptasi dengan digitalisasi dalam pelayanan publik dan partisipasi dalam inovasi pelayanan berbasis digital.

Kata kunci: ASN, Kota Metaverse, Literasi Digital

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena literasi digital menjadi trend di masa pandemi Covid-19 yang mengatasi culture shock masyarakat. Transformasi digitalisasi dalam aktivitas kehidupan masyarakat di berbagai bidang dan layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah terjadi pada masa pandemi ini. Aplikasi zoom menjadi aplikasi telekonferensi meroket pada awal Maret 2020 di Indonesia pada masa pandemi. Survei Apptopia 15 April 2020 menunjukkan aplikasi zoom merupakan aplikasi dengan peringkat pertama yang diunduh. Banyak sekolah dan perkantoran mengeluarkan kebijakan untuk belajar dan bekerja dari rumah menggunakan aplikasi zoom. Eksistensi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan publik, agar mampu mengakses teknologi mutakhir selama pandemi dalam era new normal. ASN saat ini dituntut untuk memiliki wawasan tentang perkembangan teknologi digital, mampu mengenali perangkat keras maupun perangkat lunak dalam menunjang kinerja yang dijadikan acuan dan bekal dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam melaksanakan pelayanan publik. Namun, masih terdapat ASN yang dinilai memiliki wawasan digital yang rendah pada lingkungan kementerian, seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) (Rumata & Nugraha, 2020). Kementerian Diskominfo pada tahun 2020 meneroboskan Pedoman tentang Literasi Digital yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan literasi digital yang juga berlaku bagi ASN.

Terdapat empat aspek dalam kerangka pedoman literasi yaitu cakup bermedia digital, etis bermedia digital, kompetensi bermedia digital dan aman bermedia digital. Kompetensi keterampilan digital ASN merupakan kemampuan untuk memahami, mengetahui, dalam menggunakan hardware dan software TIK juga mampu mengaplikasikan sistem operasi digital. Kemampuan ASN untuk membaca, mendeskripsikan, membiasakan, mengkaji dan membangun wawasan kebangsaan, nilai nilai pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat (Adiningsih, 2019). Survei yang dilakukan pada tahun 2019 Program for International Student Assessment (PISA) yang dicanangkan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 70 negara atau termasuk 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. ASN dituntut meningkatkan kompetensi digital. Pelayanan publik yang telah bertransformasi menggunakan teknologi, menghasilkan ASN yang lebih cakap dengan perkembangan teknologi. ASN dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan revolukompetensisi industri melalui penyesuaian kompetensi maupun kualitas yang terkait teknologi informasi.

Momentum kemajuan teknologi secara global memberikan peluang Kota Makassar dalam mewujudkan Makassar Sombere' dan smart city menuju kota dunia berbasis konsep. Kota dunia dimaksudkan Kota Makassar yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, aksesibel dan inklusifitas serta berdaya tarik tinggi dan memukau dalam banyak hal. Di antaranya potensi sumber

daya alam dan infrastruktur sosial ekonomi yang menjanjikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Metaverse dengan standar dunia. Pokok dari visi ini dapat diakumulasikan sebagai terwujudnya masyarakat sejahtera standar dunia. Dimulai dari perbaikan infrastruktur hingga pelayanan. Kota Makassar bersiap mewujudkan Makassar Kota Metaverse ditunjukkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama WIR Group. Pengembangan platform Metaverse menjadi langkah Pemkot Makassar dalam menerapkan teknologi digital dengan realitas virtual yang akan memberikan manfaat untuk masyarakat Makassar. Tahun 2021 prestasi pemerintah kota dalam inovasi pelayanan publik berbasis digital, yakni Karaeng (Dinas Pariwisata) dan Dongkelor (Dinas Perpustakaan). Atas inovasi yang digagas, pemerintah kota mendapatkan reward oleh Kementerian Pan-RB dalam nominasi Inovation Government Award (IGA) 2021 dalam 12 daerah penerima Termasuk Pelayanan publik berbasis digital (Aprianty, 2016).

Fenomena literasi digital yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya sebagai konstruksi permasalahan penelitian ini. Terfokus pada literasi digital yang diusung pemerintah kota dalam mewujudkan Kota Metaverse, dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian “Bagaimana kompetensi literasi digital ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar?” Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan, mengetahui, memahami kompetensi literasi digital ASN dalam aspek Kompetensi UNESCO yaitu: *knowledge, skill and attitude*.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kompetensi keterampilan digital ASN merupakan kemampuan untuk memahami, mengetahui, dalam menggunakan hardware dan software TIK juga mampu mengaplikasikan sistem operasi digital. Kemampuan ASN untuk membaca, mendeskripsikan, membiasakan, mengkaji dan membangun wawasan kebangsaan, nilai nilai pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat (Diah, 2016). Survei yang dilakukan pada tahun 2019 Program for International Student Assessment (PISA) yang dicanangkan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 70 negara atau termasuk 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah (Kementrain Komunikasi, 2020). Menurut Kusumastuti *et al* (2021), ASN dituntut meningkatkan kompetensi digital. Pelayanan publik yang telah bertransformasi menggunakan teknologi, menghasilkan ASN yang lebih cakap dengan perkembangan teknologi. ASN dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan revolusi industri melalui penyesuaian kompetensi maupun kualitas yang terkait teknologi informasi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait kompetensi literasi digital ASN. Penelitian Sukri (2021) menemukan bahwa konsep literasi digital sebagai media pembelajaran dalam perspektif pendidikan agama islam adalah berusaha sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil terbaik dan benar, meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan dan mengelola sumber daya serta memanfaatkan sumber daya serta memanfaatkan teknologi tepat guna tanpa menyimpang dari nilai-nilai ajaran islam. Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan atau library reaserch yaitu kumpulan kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian Rumata (2020), berfokus dalam pendalaman pengembangan kerangka literasi digital bagi kalangan ASN yang dinilai dari tiga dimensi: dimensi *knowledge, skill and attitude*. Berkaitan dengan komponen tersebut yang memiliki

relasi dengan Kompetensi Teknis yang berlaku pada Peraturan Menteri PAN RB nomor 38 tahun 2017 yang mencakup tentang aspek pengetahuan, keterampilan serta perilaku yang dapat teramati, diukur dan dikembangkan sesuai dengan bidang teknis jabatan yang diemban seorang PNS. Penelitian Sutisna (2020), menawarkan konsep antisipasi berita hoaks pada masa pandemi Covid-19. Penelitian tersebut menawarkan tentang konsep berfikir literasi digital, sehingga peneliti merasa perlu melakukan penelitian mendalam terkait kompetensi literasi digital dalam kehidupan bermasyarakat ditengah pandemi Covid-19. Penelitian Yojana (2022) menunjukkan bahwa mayoritas tingkat literasi digital pada peserta Pelatihan di Bapelkes Cikarang Kementerian Kesehatan RI adalah sangat baik (60,5%). Penelitian ini juga menguatkan penelitian sebelumnya bahwa tidak ada kesenjangan tingkat literasi digital antara laki-laki dan perempuan tetapi faktor kelompok usia, pendidikan dan pekerjaan memiliki pengaruh terhadap tingkatan literasi digital. Sedangkan penelitian Estiningsih (2023), menyatakan bahwa Literasi Digital penting untuk ASN, agar tetap relevan dan kompetitif, budaya digital menjadi lebih fleksibel dan tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai era digital, deliver yang berkesinambungan, berdampak nyata pada pemangku kepentingan. Kehati-hatian ASN dalam berdigital merupakan salah satu kode etik dan kode perilaku dalam penyelenggaraan pemerintahan agar pegawai memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; serta tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain sehingga ASN harus memahami tentang seluk beluk digital dan pilar digital.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada upaya membangun perilaku digital pada ASN. Perbedaan selanjutnya penelitian yang akan digunakan menggunakan teori eshet menekankan bahwa literasi digital seharusnya lebih dari sekedar kemampuan menggunakan berbagai sumber digital secara efektif. Literasi digital juga merupakan sebetuk cara berpikir tertentu dalam menilai sejauh mana peran diskominfo dalam membangun digitalisasi ASN. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan eksploratif dalam menentukan informan dan memperoleh suatu data pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi.

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan, mengetahui, memahami kompetensi literasi digital ASN dalam aspek Kompetensi UNESCO yaitu: knowledge, skill and attitude.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi kompetensi ASN. Gambaran kompetensi digital pada lokus penelitian menjadi asumsi dasar dalam merumuskan model literasi digital menggunakan metode deskriptif. Peneliti menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif, yang mempunyai karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data primer. Metode penelitian merupakan prosedur dan rencana penelitian yang memiliki

langkah-langkah berupa asumsi-asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis konsep kompetensi literasi digital terkait wawasan, keterampilan, dan perilaku ASN, dan telah dibahas dalam 3 (tiga) subbab berikut.

3.1. Kompetensi Knowledge ASN

Kompetensi *knowledge* bagi pegawai dapat diukur dengan memakai dua indikator yaitu, pengetahuan dasar tentang informasi dan pengetahuan dasar tentang penggunaan dan pemilahan informasi yang kemudian diakumulasikan mengikuti standar komponen kompetensi literasi digital. Kompetensi Knowledge dituntut dalam proses kompetensi digitalisasi pegawai, dalam kompetensi ini konsep *knowledge* merupakan kemampuan dasar dalam berkomunikasi serta kelihaian untuk mengolah informasi dan mengakses sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan dari kompetensi *Knowledge* adalah menjawab tingkat kematangan pegawai dalam mencari kebutuhan informasi, bagaimana pegawai menentukan media/sumber informasi dan uji validitas informasi.

Kebutuhan Informasi terjadi untuk menjawab pertanyaan terhadap suatu fenomena yang sedang terjadi. Sumber dari informasi adalah sebuah data, sehingga perlu suatu model yang nantinya akan dikelompokkan dan diproses untuk menghasilkan informasi akurat. Hal ini akan menggambarkan kualitas sebagai seorang pegawai bagaimana menjawab fenomena sosial yang sedang terjadi berdasarkan cara menjawab informasi yang sedang dibutuhkannya. Kebutuhan dasar informasi bagi pegawai mengenai data sektoral, statistik sektoral, informasi teknologi terbaru, peraturan perundang-undangan ITE, informasi mengenai jabatan, kepegawaian dan dokumen kebijakan (peran walidata). Informasi tersebut berhubungan dengan tugas, pokok dan fungsi dari masing-masing bidang yang setiap harinya membutuhkan informasi *ter-update* dan *cross check* dari pimpinan. Data sektoral dan statistik sektoral merupakan data yang harus akurat informasinya untuk kemudian dilakukan koordinasi kepada Diskominfo Provinsi Sulawesi Selatan untuk diseminasi informasi kepada publik melalui website portal satu data dan Chanel Youtube KominfoTV.

Tampak pada gambar di bawah ini, merupakan tampilan dari portal satu data Kota Makassar tempat diseminasi informasi kategori data sektoral dan statistik sektoral setelah uji validitas informasi.



Gambar 3.1 Tampilan Website Satu Data.

Dalam website satu data Kota Makassar menyajikan beberapa informasi data sektoral di masing-masing bidang. Data akan di input sesuai dengan jenis dan bidangnya setelah dilakukan uji validitas informasi sebelum dilakukan diseminasi. Selain tampilan website, diskominfo juga memiliki chanel youtube . KominformoTV menyajikan informasi statistik secara general dengan tampilan yang lebih menarik. Masyarakat juga dapat memberikan tanggapan di kolom komentar chanel tersebut. Informasi tersebut kemudian dibedakan menjadi informasi internal dan informasi publik. Informasi internal ditujukan untuk pimpinan instansi atau yang berwenang dalam mengakses sebuah data yang dijaga peredarannya. Sehingga dalam mengakses informasi tersebut diperlukan permohonan terlebih dahulu kepada perangkat daerah tersebut.

Daftar menu informasi dikecualikan memuat data privasi pejabat atau data pribadi masyarakat. *Highlighter* kebutuhan informasi bagi pegawai Diskominfo merupakan informasi mengenai data sektoral, informasi mengenai teknologi mutakhir, statistik sektoral, isu nasional provinsi dan informasi terkait tugas masing-masing bidang untuk selanjutnya dilakukan pengelolaan data untuk memastikan kualitas informasi yang didapatkan. Pegawai menentukan sumber informasi melalui perangkat daerah, narasumber terkait, website resmi pemerintah dan artikel resmi kerjasama dinas (PT.Indikator Indonesia).

Fasilitas informasi bagi pegawai juga disediakan berbentuk artikel mingguan berkerja sama dengan Diskominfo Provinsi membahas tentang isu mingguan provinsi yaitu kerjasama dengan media online PT. Media Indonesia Indikator yang juga bekerja sama dengan seluruh Diskominfo di berbagai provinsi. artikel *daily report* menyajikan informasi mengenai isu terkini, berita pemerintahan, berita pimpinan, rekomendasi isu pimpinan, rekomendasi isu Perangkat Daerah, potensi isu krisis yang juga Diskominfo Kota bekerja sama dengan Diskominfo Provinsi akan membuat podcast mengenai isu sentrik Kota Makassar. Setelah kebutuhan informasi pegawai terjawab dilakukan pengelolaan data untuk menyaring informasi seperti kegiatan koordinasi atau yang sering disebut uji validitas informasi yaitu membandingkan data dengan kejadian dilapangan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, dapat disimpulkan pegawai sangat berhati-hati dalam mengelolah sebuah informasi sebelum dipublikasi untuk menghindari adanya kesalahan fatal dalam mencapai sasaran informasi. Kekeliruan dalam publikasi dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Penyalahgunaan pendistribusian informasi dapat menyebabkan kebocoran data dan pencurian identitas yang telah diatur dalam UU yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Tujuan dari dimensi *knowledge* adalah mengukur kecakapan pegawai dalam publikasi informasi diruang digital untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan amanat surat edaran Menteri-PANRB 58/2020. ASN Diskominfo dikategorikan berada dalam tingkatan level lima, kompetensi Literasi Digital komponen *Knowledge*. Pegawai secara mumpuni dapat secara tepat mengelolah informasi di ruang digital antar sesama pegawai dan untuk disebarkan luaskan kepada seluruh masyarakat melalui proses uji validitas data.

Informasi yang telah melalui uji validitas dapat dianggap sebagai sebuah data. Penggunaan dan pemilihan data merujuk pada kapan sebuah waktu informasi dapat disebarkan ke publik, disertai dengan pertimbangan-pertimbangan mengenai data yang harus di publikasi apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

ID	Judul Informasi	Tanggal	Deskripsi	Aksi
1	Data Pengantar Energi Listrik	18/10/2021	Check Terutama Pagar, notifikasi dan Pemasangan Pivotal Sistem Selandar	Detail
2	SA DAPAT INFORMASI DAN LALU LAKS CPC BCD TAHUN 2022	28/10/2021	Setor Pengawasan Desain Proses Sistem Selandar	Detail
3	Data Informasi yang Dibutuhkan Berhubungan Hasil Pengujian Konektivitas	14/10/2021	Check Konektivitas dan Konektivitas Proses Sistem Selandar	Detail
4	Uji Konektivitas	18/10/2021	Rumit Saat Urut (RUC) Labung Bai	Detail
5	Kelelahan di Konektivitas	18/10/2021	Rumit Saat Urut (RUC) Labung Bai	Detail
6	SA Dokumen yang Dibutuhkan	24/07/2021	Rumit Saat Urut (RUC) Labung Bai	Detail
7	Dokumen yang Dibutuhkan	24/07/2021	Rumit Saat Urut (RUC) Labung Bai	Detail
8	Data Informasi yang Dibutuhkan	21/09/2021	Setor Perencanaan, Pembangunan, Pemasangan Dan Pengembangan Desain Proses Sistem Selandar	Detail
9	Data Informasi Dibutuhkan	22/10/2021	Check Konektivitas dan Pemasangan Sipi Proses Sistem Selandar	Detail

Gambar di atas merupakan informasi yang dikecualikan, dalam menu ini memuat data kependudukan dan pencacatan sipil, pengamanan informasi pemerintah daerah persandian, data perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang dapat menyebabkan pencurian data. Akumulasi dari hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa pegawai sangat berhati-hati dalam mengelolah sebuah informasi sebelum dipublikasi untuk menghindari adanya kesalahan fatal dalam mencapai sasaran informasi. Kekeliruan dalam publikasi dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Penyalahgunaan pendistribusian informasi dapat menyebabkan kebocoran data dan pencurian identitas yang telah diatur dalam UU yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Tujuan dari dimensi *knowledge* adalah mengukur kecakapan pegawai dalam publikasi informasi diruang digital untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan amanat surat edaran Menteri-PANRB 58/2020. ASN Diskominfo dikategorikan berada dalam tingkatan level lima, kompetensi Literasi Digital komponen *Knowledge*. Pegawai secara mumpuni dapat secara tepat mengelolah informasi di ruang digital antar sesama pegawai dan untuk disebarluaskan kepada seluruh masyarakat melalui proses uji validitas data.

3.2. Kompetensi Skill ASN

Kompetensi *skill* ASN menitikberatkan pada kemampuan untuk beradaptasi dengan penguasaan teknologi, sarana dan prasarana di bidang pelayanan informasi serta kecakapan dalam proses digitalisasi. Pondasi dalam mendalami pengembangan literasi digital yang lebih *upgrade* merupakan penguasaan keterampilan teknis di bidang TIK. Diantaranya mampu untuk beradaptasi melakukan digitalisasi kebudayaan kerja termasuk kemampuan dalam menggunakan media telekonferensi dan entertainment dalam ruang digital. Media telekonferensi yang sering digunakan adalah *whatsapp* dan *gmail*, sedangkan media entertainment yang sering diakses adalah Instagram. Media enteretainment Instagram dapat mengunggah foto atau video disertai dengan caption selain itu dapat tersimpan dalam *feeds*, *highlight* dan *reels* sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan *feedback* dikolom komentar terkait informasi yang disampaikan (A et al., 2022).

Intensitas penggunaan ruang digital tersebut menjadi rutinitas pegawai dan termasuk dalam kebiasaan sehari-hari. Penggunaan scan barcode untuk menambahkan nomor atau id akun, mendapatkan informasi, interaksi antar *user* atau penulisan berita menjadi kebiasaan baru pegawai. Ruang digital menjadi sarana komunikasi virtual yang lebih efektif bagi pegawai. Pertukaran informasi dan pengiriman data dapat dilakukan secara cepat di ruang yang sama. Media tersebut memiliki *user interface* yang mudah dipahami dari berbagai kalangan sehingga komunikasi virtual dapat dilakukan secara praktis.

Peneliti menyimpulkan penggunaan ruang digital tersebut selain *user friendly* juga familiar ditengah masyarakat, terutama hemat kuota dibanding menggunakan telepon dengan pulsa prabayar. Pemanfaatan ruang digital bagi pegawai digunakan untuk *sharing* informasi, konfirmasi data antar instansi, koordinasi internal antar pegawai dan ruang penyampaian informasi kepada masyarakat. Ruang Digital yang digunakan pegawai sebagaimana tampak di atas, selain untuk berinteraksi secara virtual dapat juga digunakan untuk uji validitas data dengan cara membandingkan artikel-artikel dalam mendapatkan informasi ter-*update*. Penyampaian informasi pemerintah yang dulunya berbetuk fisik seperti koran, majalah atau poster kini berganti menjadi artikel, *e-paper*, infografis atau video singkat seperti *reels* di Instagram.

Dalam menu informasi pegawai sebagaimana dalam gambar di atas, pegawai juga dapat memposting berita dalam website ini, baik dalam berupa kebijakan, pengumuman dan layanan informasi, sehingga akan tampil *pop-up* (notifikasi) informasi utama. Adanya layanan fitur tersebut memudahkan masyarakat dalam menemukan informasi sehingga, diseminasi informasi dapat dilakukan lebih cepat dan mudah.

Hambatan yang ditemukan ketika menggunakan ruang digital tersebut menurut Kabid Aptika adalah adanya faktor internal yang membuat ruang digital tersebut tidak dapat diakses (lambat *loading*) karna terkendala jaringan. Kendala jaringan yang tidak stabil jika berada di dalam ruangan menyebabkan putusnya koneksi, sehingga menyebabkan pesan atau file yang sedang diunggah mengalami penundaan pengiriman. Peneliti menyimpulkan, bahwa faktor internal tidak dikategorikan sebagai faktor yang mengurangi kompetensi pegawai. Kompetensi ini berorientasi dengan seberapa cakap pegawai dalam beradaptasi dengan digitalisasi melalui pemanfaatan TIK. Untuk meningkatkan kapasitas kompetensi pegawai, dinas memberikan kesempatan bagi pegawai mengikuti diklat dalam penguatan kompetensi TIK *Government Transformation Academy (GTA)* dan *Digital Talent Scholarship (DTS)*.

Diskominfo Kota Makassar yang menciptakan inovasi digital konsep *Metaverse* yaitu *War Room* yang dikendalikan oleh 53 tenaga ahli, beroperasi 24 jam dengan 4 shift yang mampu mendeteksi gangguan sistem. Tahap pengembangan operation room akan diintegrasikan dengan data-data dari beberapa SKPD untuk mengarah ke Big Data sesuai tujuan operation room sebagai pusat pengambilan keputusan berbasis data. Inovasi ini membuat Wali Kota Danny Pomanto menerima Digital Innovation Award 2022 dari MNC Portal Indonesia pada pihak-pihak yang sukses menciptakan dan mengembangkan inovasi berbasis digital. Ruang inovasi digital tersebut atau yang dikenal dengan *War Room* dikelilingi oleh 58 tenaga ahli untuk memantau gangguan sistem dan data dari *malware* dengan full beroperasi selama 24 jam

War room merupakan salah satu program Kota *Metaverse* di Kota Makassar adalah menggunakan CCTV Berteknologi Face Recognition sasaran teknologi kamera Face Recognition atau pendeteksi wajah, yaitu bisa berfungsi sebagai pemantauan (*surveillance*) tindak kriminal. Teknologi ini bisa mengenali wajah masyarakat sekaligus mengidentifikasi gerak-gerik seseorang yang mencurigakan. Hasil dari kompetensi literasi digital dimensi *Skill* pegawai diskominfo di kategorikan berada dalam tingkatan level 5 ASN Diskominfo secara umum dikategorikan telah melakukan digitalisasi melalui pemanfaatan TIK di ruang digital antar sesama pegawai dan masyarakat dalam pelayanan berbasis digital serta pengembangan inovasi digital.

3.3. Kompetensi Attitude ASN

Kompetensi *Attitude* merupakan dimensi terakhir yang menjadi tolak ukur keberhasilan literasi digital. Mengamati perilaku pegawai dalam dunia digital dalam mengambil tindakan dalam berkomunikasi ke berbagai ruang digital baik dengan menggunakan media suara, gambar dan video dengan memperhatikan mitigasi resiko sebelum mendistribusikan informasi. Perkembangan komunikasi digital memiliki karakteristik komunikasi global yang melintasi batas-batas geografis dan batas-batas kompetensi. Sementara setiap batas geografis dan kompetensi juga memiliki batasan etika yang berbeda. Dengan adanya media digital setiap orang (*netizen*) berpartisipasi dalam berbagai hubungan dengan banyak orang yang menggunakan ruang digital yang sama. Menggunakan jejaring sosial, *blogging*, *vlogging*, *game*, pesan instan, mengunduh dan mengunggah serta membagikan berbagai konten hasil kreasi mereka (pegawai) sendiri.

Pegawai membangun hubungan di dalam ruang digital seperti berkolaborasi dengan perangkat dinas yang lain atau pelayanan digital kepada masyarakat. Maka segala aktivitas digital di ruang digital dan menggunakan media digital memerlukan sebuah etika digital. Pegawai secara mampu membedakan informasi yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan atau konten negatif lainnya. *Monitoring media sosial* dilakukan setiap hari di bidang Humas dengan sasaran tujuan apabila ditemukan pelanggaran etika dalam ruang digital maka akan dilakukan penandaan situs/postingan/portal oleh pegawai Diskominfo untuk kemudian ditindak lanjuti. Monitoring media online ini juga mengontrol nilai-nilai didalam diri pegawai, untuk menjaga batasan dalam hal publikasi. Tahun 2018 terdapat sebuah pelanggaran ujaran kebencian yang dilakukan oleh seorang politisi asal Makassar. BKN menerima pengaduan dari masyarakat atas keterlibatan ASN dalam ragam aktivitas ujaran kebencian yang turut memperkeruh situasi bangsa. ASN yang terbukti menyebarkan ujaran kebencian dan berita palsu ini masuk kategori pelanggaran disiplin Sehingga BKN menginstruksikan seluruh jajaran ASN tidak menyebarkan berita palsu dan ujaran kebencian bermuatan SARA yang berpotensi sebagai sumber perpecahan bangsa.

Diskominfo sudah mencoba mengatasi konten negatif dengan cara menggunakan “Ais” sebagai penangkal konten negatif. Mesin ini mengawasi berbagai konten yang beredar dan mengais (*crawling*) konten-konten negatif untuk diblok lalu dihapus agar tidak bisa diakses oleh masyarakat. Namun ada yang mengatakan bahwa mem-blok konten negatif tidak efektif jika tidak ada kerjasama dengan masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Kominfo bahwa sampai tanggal 31 Desember 2019, Kemenkominfo telah melakukan pemblokiran terhadap 1.857.907 konten negatif di internet. Pegawai Diskominfo ikut serta berpartisipasi dalam kolaborasi ruang digital tersebut, dapat dilihat dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 yang mengamanatkan Implementasi *Core Values* dan

Employer Branding ASN. Edaran ini menjadi kerangka dasar strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia yang terintegrasi keseragaman nilai-nilai dasar bagi ASN serta menciptakan kode etik ASN dan ASN berAKHLAK.

Perilaku pegawai dalam ruang digital mampu menunjukkan pengimplementasian dari nilai-nilai kode etik. ASN Diskominfo Kota Makassar secara hukum tercatat bersih dari kasus pelanggaran etik dalam ruang digital serta mampu menyesuaikan pola kerja sesuai dengan reformasi birokrasi.

Pentingnya memproduksi dan mendistribusikan pesan yang baik sesuai dengan netiket juga dikampanyekan oleh diskominfo maupun komunitas masyarakat yang disebar melalui perangkat digital mereka seperti di website dan media sosial baik berupa artikel ataupun poster. Informasi yang disalurkan kepada masyarakat harus tepat sasaran dengan saluran yang tepat. Supaya tidak terjadi kesalahan komunikasi yang berakibat sulitnya diterima informasi yang diberikan, bahkan terjadi salah persepsi antara pemberi informasi dan penerima informasi. Hal-hal seperti itu harus dihindari, terlebih lagi menyangkut dengan pesan yang bersifat sensitive. Sehingga dalam hal ini pegawai harus mampu memahami manajemen resiko serta klasifikasi data yang tidak dapat disebar luaskan.

Peneliti menyimpulkan bahwa tindakan pegawai sebelum mendistribusikan informasi dinilai tepat, yaitu pegawai melakukan *cross check* data sebelum didistribusikan serta menelaah kembali kalimat yang digunakan dalam sebuah berita atau informasi sebelum di unggah ke website resmi Diskominfo agar tepat sasaran dan tidak menciptakan ambiguitas informasi atau dwimakna. Sehingga dalam dimensi *Attitude* ASN Diskominfo masuk kedalam komponen kompetensi literasi digital level 5, yaitu tingkat ahli kompetensi yang mampu menghasilkan sumber informasi yang akurat, teruji dan mampu mengelolah informasi tersebut agar tepat sasaran.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pandangan inklusif tentang konsep literasi digital dalam bagian ini, lebih mendiskusikan pemaknaan konsep, defenisi, karakteristik, tingkat kompetensi dan model komponen yang bersumber dari beberapa pandangan ahli. Kegunaan konsep atau teori literasi digital yang dibangun, untuk lebih menjelaskan arah dan kedudukannya di dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh (Sukri, 2021) dengan judul “Literasi Digital Sebagai Media Pembelajaran Dalam Perspektif Pendidikan Islam” konsep literasi digital sebagai media pembelajaran dalam perspektif pendidikan Islam adalah berusaha sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil terbaik dan benar, meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan dan mengelola sumber daya serta memanfaatkan teknologi tepat guna tanpa menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis literasi digital sebagai media pembelajaran dan perbedaannya adalah berokus pada penggunaan media digital sebagai media pembelajaran. (Rumata & Nugraha, 2020)“Rendahnya tingkat perilaku digital ASN kementerian kominfo: Survei literasi digital pada instansi pemerintah” Persamaan pada penelitian terletak pada teori yang digunakan merupakan teori Literasi Digital dari UNESCO Tahun 2018 yang terfokus pada kompetensi literasi digital ASN pada tingkat kementerian pusat. Perbedaannya terdapat pada metode penelitian dan pendekatan yang dilakukan yaitu penelitian statistik deskriptif dengan metode statistik kuantitatif serta lokus peneliti.(Dewita, 2021)“Gerakan Literasi Digital Pada Masa Pandemi Covid-19” Berfokus pada gerakan literasi digital pada masa pandemi tetapi lebih menguraikan pada sisi penangkalan hoax.

Gerakan literasi digital akan menciptakan pola pikir kreatif dan kritis. Dengan adanya gerakan literasi digital akan membantu masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan mendapatkan bahan bacaan yang berkualitas dalam mengisi waktu.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa secara garis besar penelitian ini berdasarkan konsep Unesco mengenai kompetensi literasi digital, ASN Diskominfo Kota Makassar secara mumpuni beradaptasi dengan kompetensi digitalisasi dalam pelayanan publik dan partisipasi dalam inovasi pelayanan berbasis digital.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa ASN saat ini dalam ruang kerja birokrasi 4.0 menuju Birokrasi Berkelas Dunia untuk menjalankan Agile Government (birokrasi yang dinamis dan lincah). Literasi Digital menjadi faktor utama dalam mencapai digitalisasi kerja yang sasaran utamanya mendukung Kota Makassar sebagai Kota Metaverse. Literasi Digital berarti pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan oleh orang perorangan untuk secara maksimal membantu produktifitas dalam bekerja. Hal ini menjadi satu konsep akumulasi dari penanaman Literasi Digital bagi ASN serta menjadi pondasi dari konsep Kota Metaverse yang digagas oleh WaliKota Makassar. Hal ini tidak terlepas dari peran besar ASN sebagai role model masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu hanya berfokus pada dimensi knowledge, skills, dan attitude dari ASN pada Diskominfo, tetapi peneliti berharap semoga selanjutnya dapat dilakukan penelitian sejenis dengan cakupan yang lebih luas lagi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan digitalisasi dalam pelayanan public dan partisipasi ASN dalam inovasi pelayanan berbasis digital.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Irfan Uluputty, S.STP, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang selalu memotivasi peneliti untuk menyelesaikan penelitian skripsi serta meluangkan waktu dan mentrasfer ilmu metodologi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan peneliti.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Rumata, Vience Mutiara, and Dimas Aditya Nugraha. "Rendahnya Tingkat Perilaku Digital ASN Kementerian Kominfo: Survei Literasi Digital Pada Instansi Pemerintah." *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)* 4, no. 2 (2020): 467. <https://doi.org/10.25139/jsk.v4i2.2230>.

Sri Adiningsih, S. E. Transformasi ekonomi berbasis digital di Indonesia: lahirnya tren baru teknologi, bisnis, ekonomi, dan kebijakan di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Aprianty, Diah Rachma. "Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan

- Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.” EJournal Ilmu Pemerintahan volume 4, no. 4 (2016): hlm. 1593.
- Diah Rachma Aprianty, “Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda,” EJournal Ilmu Pemerintahan volume 4, no. 4 (2016): hlm. 1593.
- Komunikasi, Kementerian. 2020. “Rendahnya Tingkat Perilaku Digital ASN Kementerian Kominfo : Survei Literasi Digital Pada Instansi Pemerintah.” 4(July): 467–84.
- Kusumastuti, Frida, Santi Indra Astuti, Frida Kusumastuti, Santi Indra Astuti, Yanti Dwi Astuti, Mario Antonius Birowo, Lisa Esti, et al. Etis Bermedia Digital, n.d.
- Muhammad, Sukri. Literasi Digital Sebagai Media Pembelajaran Dalam Perspektif Pendidikan Islam. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Sutisna, I Putu Gede. “Gerakan Literasi Digital Pada Masa Pandemi Covid-19.” STILISTIKA: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Seni 8, no. 2 (2020):
- Estiningsih, Mudji. Indonesia Cakap Digital Melalui Kegiatan Literasi Digital Bagi Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Jurnal Pengabdian Masyarakat 1(5) (2023).
- Yojana, Yana. Gambaran Literasi Digital Tenaga Kesehatan Peserta Pelatihan di Bapelkes Cikarang Kementerian Kesehatan RI. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan. (2022).

